

INTERFAITH DIALOGUE SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA DALAM ISU ROHINGYA**(INTERFAITH DIALOGUE INDONESIAN SOFT POWER DIPLOMACY ON ROHINGYA ISSUES)****Adirini Pujayanti**

(Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Nusantara I, Lantai 2, DPR RI
 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
 email: apujayanti@yahoo.com)

Naskah Diterima: 15 Oktober 2018, direvisi: 15 November 2018,
 disetujui: 15 Desember 2018

Abstract

Indonesia, has harmony amid its ethnic diversity and different religion, becomes an example on how a country builds tolerance and harmony. Therefore many countries want to learn from Indonesia. This create soft power diplomacy asset and has a positive influence in Indonesia's position in international arena. With these assets, Indonesia seeks to play a role in helping create a peaceful solution to conflicts in the world, including helping resolve the Rohingya conflict and build peace in Myanmar. This article aims to see the effectiveness of soft power diplomacy through interfaith dialogue on the Rohingya issue in Myanmar. This research will help DPR in supervising the Government's efforts in foreign politics, especially in building soft power through interfaith dialogue diplomacy. This qualitative research using the theory of soft power from Joseph Nye. Field research was carried out in Surabaya (East Java) and Kupang, Alor (NTT) in 2017. This research reveals that soft power diplomacy through interfaith dialogue is not easy to implement to help harmonize inter-ethnic and religious life in Myanmar due to lack of political will the Myanmar government has in building interfaith dialogue among Myanmar. Indonesia thus must seek other solutions to find solutions to the Rohingya issue in Myanmar. For examples by building international cooperation with parties and countries with an interest in the Rohingya issue.

Keywords: *peace diplomacy; interfaith dialogue; Rohingya; soft power; Myanmar*

Abstrak

Indonesia yang rukun dalam keberagaman suku dan agama kerap menjadi negara contoh bagaimana sebuah negara membangun toleransi dan harmoni. Banyak negara ingin belajar dari Indonesia. Hal ini menjadi aset soft power diplomasi dan berpengaruh positif pada posisi Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan aset tersebut Indonesia berupaya turut berperan membantu menciptakan solusi damai pada masalah konflik di dunia, diantaranya berupaya membantu menyelesaikan konflik Rohingya dan membangun perdamaian di Myanmar. Tulisan ini bertujuan melihat efektifitas diplomasi soft power interfaith dialogue dalam isu Rohingya di Myanmar. Penelitian ini akan membantu DPR dalam melakukan pengawasan kinerja Pemerintah di bidang politik luar negeri, khususnya dalam membangun diplomasi soft power interfaith dialogue. Merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori soft power dari Joseph Nye. Penelitian lapangan dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Kupang, Alor (NTT) tahun 2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi soft power melalui interfaith dialogue tidak mudah diterapkan untuk membantu perdamaian dan kehidupan harmonis antar etnis dan umat beragama di Myanmar karena kurang adanya political will pemerintah Myanmar dalam membangun interfaith dialogue antara rakyat Myanmar. Indonesia harus mencari solusi lain untuk mencari solusi isu Rohingya di Myanmar. Diantaranya dengan membangun kerjasama internasional dengan pihak dan negara-negara yang berkepentingan dengan isu Rohingya.

Kata kunci: *diplomasi damai; interfaith dialogue; Rohingya; soft power; Myanmar*

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945, Indonesia secara aktif turut membantu mewujudkan perdamaian dunia. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Joko Widodo, sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar yang moderat dan majemuk, sekaligus negara terbesar ketiga di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjadi bagian dari solusi permasalahan global.¹ Kekuatan

diplomasi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia ditunjang oleh kemampuan *soft power* Indonesia berbagi pengalaman dan pengetahuannya dalam berdemokrasi dan memainkan peran sebagai mediator atau fasilitator perdamaian.² Indonesia tidak dapat menutup mata terhadap apa yang terjadi terhadap Rohingya di Myanmar. Dari banyak isu yang menjadi perhatian Indonesia, kasus Rohingya merupakan kasus yang menjadi salah satu prioritas perhatian.

¹ "Indonesia berkontribusi dalam Perdamaian Dunia", *Media Indonesia*, 15 Februari 2018, hlm.2.

² Lina A. Alexandra, "Offering Support and Sharing Experiences: Indonesia's Approach to Peacebuilding", dalam Call, Charles T,

de Coning, Cedric (Eds.), *Rising Powers and Peacebuilding*, London: Palgrave Macmillan, 2017, hlm. 39-68.

Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebut etnis Rohingya sebagai etnis minoritas paling teraniaya di dunia.³ Myanmar merupakan rumah bagi hampir satu juta orang warga Rohingya. Namun sebagai minoritas, eksistensi mereka diabaikan sebagai bagian dari warga Myanmar. Minoritas muslim Rohingya dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh tanpa kewarganegaraan. Konflik dan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya di negara bagian Rakhine di terus terjadi. Bahkan di tahun 2016 dan 2017 terjadi genosida dalam kerusuhan di negara bagian Rakhine. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. Marsudi menyebutnya sebagai *cycle of violence*.⁴ Krisis kemanusiaan Rohingya, semakin menyadarkan Indonesia bahwa persaudaraan dan persatuan merupakan hal yang tidak ternilai.

Isu Rohingya telah menjadi keprihatinan internasional sehingga banyak pihak berupaya membantu mencari penyelesaian damai masalah ini. Dalam tinjauan pustaka Katja Weber dan Allison Stanford "*Myanmar: Promoting Reconciliation between the Rohingya Muslims and Buddhists of Rakhine State*"⁵ Mengusulkan proses rekonsiliasi tiga tahap antar elite untuk Negara Bagian Rakhine dan mengkaji langkah-langkah yang harus diambil untuk mempromosikan rekonsiliasi tersebut. Sedangkan Mary P Callahan dalam "*MYANMAR IN 2017: Crises of Ethnic Pluralism Set Transitions Back*"⁶ belum tercapainya perdamaian antar etnis di Myanmar karena kesalahan elite, Pemerintahan Aung San Suu Kyi, mengingkari janjinya untuk memerintah bersama dengan rakyat untuk pembangunan, perdamaian dan rekonsiliasi.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini berupaya melihat upaya membangun perdamaian Myanmar tidak dari kalangan elitnya, tetapi dari masyarakatnya (*grassroot*). Pelibatan masyarakat secara dalam proses perdamaian diharapkan akan lebih berhasil dalam membangun perdamaian. Langkah diplomasi *soft power* Indonesia untuk mengatasi isu Rohingya ini antara lain membuka kerja sama *interfaith dialogue* dan mendorong pentingnya membuka akses untuk bantuan kemanusiaan, disamping juga mendorong penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia

semua komunitas di Rakhine termasuk Rohingnya. Indonesia memilih langkah konstruktif untuk membantu di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kewirausahaan, demokrasi dan pemerintahan.

Pertanyaan penelitian yang akan berusaha dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana upaya diplomasi *soft power* Indonesia dapat membantu Myanmar dalam membangun perdamaian? Berdasarkan permasalahan tersebut, diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa kekuatan *soft power* Indonesia?
2. Bagaimana peran diplomasi *soft power* Indonesia dalam upaya penyelesaian masalah Rohingya?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya diplomasi *soft power* Indonesia membantu menjaga perdamaian di kawasan, khususnya dalam isu Rohingya di Myanmar. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Komisi 1 dan BKSAP DPR RI dalam membantu dan mengawasi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian diawali dengan mengidentifikasi permasalahan dan pertanyaan penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memandu kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi secara mendalam terkait topik dan permasalahan penelitian. Dari kegiatan pengumpulan data dan penggalian informasi, dan juga setelah data dan informasi yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, diharapkan akan diperoleh gambaran yang semakin jelas mengenai upaya *soft power* diplomasi Indonesia dalam upaya penyelesaian damai masalah Rohingya di Myanmar.

Power yang dimiliki oleh sebuah negara dapat berbeda-beda sesuai dengan potensi negara tersebut. Bagi negara *non-super power* baik dalam hal militer maupun ekonomi, *soft power* adalah satu upaya alternatif untuk meningkatkan pengaruh di dunia internasional. Tidak untuk mendominasi tetapi untuk meningkatkan tampilan dan kehadiran mereka dalam dunia internasional. Joseph Nye mendefinisikan *soft power* yaitu kemampuan untuk memperoleh apa yang dikehendaki tanpa paksaan namun dengan menggunakan daya pikat untuk membentuk

³ A.guest. "Who are the Rohingya refugees?", 2016, (online) (<https://www.amnesty.org.au/who-are-the-rohingya-refugees/>, diakses 4 January 2017).

⁴ Tragedi Kemanusiaan atas Etnik Rohingya, 2017, (online) (https://article.wn.com/view/2017/09/11/Tragedi_Kemanusiaan_atas_Etnik_Rohingya/, diakses 19 September 2017).

⁵ Weber, Katja; Stanford, Allison. "Myanmar: Promoting Reconciliation between the Rohingya Muslims and Buddhists of Rakhine State" *Social Justice*; San Francisco Vol. 44, Iss. 4, (2017): 55-82,167.

⁶ Callahan, Mary P. "MYANMAR IN 2017: Crises of Ethnic Pluralism Set Transitions Back" *Southeast Asian Affairs*; Singapore (2018): 243-263.

keberpihakan.⁷ Faktor yang menjadi daya pikat diantaranya daya tarik budaya, nilai-nilai bangsa dan kebijakan luar negeri. Kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain tersebut dilaksanakan dengan melalui cara ko-optif untuk membingkai agenda, meyakinkan, dan memunculkan daya tarik positif untuk mendapatkan hasil yang diinginkan.⁸ Judith Trunkos, menyatakan *soft power* merupakan sumber daya nasional yang unggul sebagai kemampuan negara yang dapat digunakan untuk mempengaruhi negara lain demi mencapai hasil yang diinginkan atau kepentingannya. *Soft power* ini dapat diwujudkan dalam instrumen dan teknik kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara.⁹ Dalam melaksanakan diplomasi *soft power* tersebut, Indonesia banyak dibantu aktor negara di antaranya organisasi agama maupun LSM kemanusiaan. Hal ini sebagaimana konsep diplomasi modern R.P. Barston yang menyatakan aktor pelaksanaan *soft power* bukan hanya pemerintah saja, namun juga aktor non-negara. Para pelaku hubungan internasional non-negara telah berkembang dalam jumlah jenis, di antaranya termasuk kelompok agama transnasional, yayasan internasional, donor dan medis.¹⁰

METODOLOGI

Dalam penelitian kualitatif ini, pengumpulan data dan informasi digunakan dengan teknik wawancara mendalam (*in depth interview*) untuk data primer dan studi dokumentasi untuk data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan dan observasi, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data primer didapat dari wawancara dengan informan baik yang berasal dari pemerintah pusat, daerah/kota. Narasumber yang berada di wilayah Jakarta, didapat melalui FGD dengan Kementerian Luar Negeri, sedangkan nara sumber di daerah diantaranya kantor wilayah kementerian agama, ormas keagamaan dan tokoh masyarakat dan perguruan tinggi.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan terkait topik dan permasalahan

penelitian, yang diperoleh dari surat kabar, jurnal, buku, dan dokumen tertulis lainnya serta media *online*. Pengumpulan data juga akan dilakukan melalui wawancara secara mendalam, baik di Jakarta maupun di daerah, dengan narasumber atau informan terkait yang dapat memberikan informasi seputar topik dan permasalahan penelitian. Narasumber atau informan di Jakarta adalah para pihak dari:

Penelitian lapangan dilakukan di Kupang dan Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Surabaya di Jawa Timur. Kondisi keberagaman agama dan kultur yang ada di Nusa Tenggara Timur digunakan sebagai pembanding sebagai masukan dalam penyelesaian kasus Rohingya di Myanmar. Kemampuan Pemda Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menjaga kerukunan dan toleransi masyarakat penting untuk dilihat untuk menemukan bentuk-bentuk toleransi dan harmoni antara mereka yang dapat diangkat sebagai unsur kekuatan diplomasi *soft power* Indonesia. Hasil Survei Nasional Kerukunan Umat Beragama yang dilakukan Kementerian Agama pada tahun 2015 menunjukkan Provinsi NTT (83,3 persen) menjadi provinsi dengan tingkat kerukunan agama tertinggi. Kabupaten Alor merupakan salah satu kabupaten yang memperoleh penghargaan Harmoni Award 2016.¹¹ Upaya menumbuhkan toleransi dan harmoni di NTT perlu dianalisa untuk memperkuat diplomasi *soft power* Indonesia dalam penyelesaian masalah Myanmar

Kondisi keberagaman agama dan kultur yang ada di Jawa Timur juga digunakan sebagai pembanding upaya menjaga kerukunan beragama dengan dialog antar agama. Meskipun masih juga terdapat kasus intoleransi di provinsi tersebut, hal itu tidak banyak mengubah kondisi sosial masyarakatnya berkat kemampuan Pemda Provinsi Jawa Timur dalam menjaga kerukunan dan toleransi masyarakatnya.

PEMBAHASAN

A. Kekuatan Soft Power Indonesia

Kekuatan *soft power* satu negara terletak pada daya tarik budaya, nilai-nilai kebangsaan dan kebijakan luar negerinya. Ketiga faktor tersebut akan dibahas dengan melihat kondisi yang ada di Indonesia.

⁷ Joseph S. Nye, *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, 1st ed. New York: Public Affairs, 2004, hlm. x.

⁸ Judit Trunkos, *What is Soft Power Capability and How Does it Impact Foreign Policy*, Carolina: University of South Carolina, 2013, hlm. 2.

⁹ *Ibid.*, hlm.4-5

¹⁰ R.P Barston, *Modern Diplomacy*, Fourth Edition, New York: Routledge, 2014, hlm.7-8

¹¹ "Pelayanan ke Semua Agama Baik, Purwakarta Diganjar Harmoni Award", 26 Februari, 2017. Pikiran Rakyat, (*online*) (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/02/26/pelayanan-ke-semua-agama-baik-purwakarta-diganjar-harmoni-award-394618>, diakses 26 Februari 2017)

1. Daya Tarik Budaya

Budaya merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya yang ada ini terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan banyaknya pulau tersebut Indonesia memiliki beragam budaya yang sangat banyak sekali. Ada lebih dari 350 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia dan terdapat 1211 bahasa (1158 bahasa daerah) yang diberi kode oleh BPS tahun 2010. Berbagai suku bangsa tersebut hidup tersebar di lebih dari 17.500 pulau di Indonesia. Keanekaragaman budaya etnis yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia sesungguhnya memiliki semua syarat dan sifat untuk tidak bersatu. Perbedaan dan keberagaman kehidupan Indonesia Indonesia begitu besar sehingga wajar untuk hidup bersatu. Namun di atas semua perbedaan dan keberagaman tersebut, Indonesia bersatu.

Dalam kehidupan beragama, Indonesia juga berbeda dengan negara-negara Balkan, eks Uni Soviet, Timur Tengah yang hanya terdiri dari agama-agama tua seperti Islam, Yahudi, Kristen namun masih kerap terjadi konflik horizontal. Di Indonesia ke lima agama resmi negara yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dapat hidup berdampingan. Indonesia berupaya tampil sebagai *the moderate force* yang menampilkan wajah Islam yang toleran dan damai.¹² Berbeda dengan negara-negara tersebut, Indonesia memiliki latar belakang sejarah yang berbeda. Indonesia adalah negara kepulauan yang dihuni oleh multi etnis dengan budaya masing-masing sehingga mudah terpengaruh dari luar. Sebagai negara kepulauan upaya membendung pengaruh pemecah belah bangsa tidak mungkin dilakukan dengan membangun tembok pembatas, sebagaimana di negara-negara kontinental.

Kemajemukan bangsa Indonesia dengan keanekaragaman suku, budaya, dan agama yang dapat hidup harmonis merupakan daya tarik Indonesia. Kemajemukan Indonesia diterjemahkan ke dalam kebijakan *multicultural* sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara. Dalam

pendekatan *multicultural* yang dilakukan adalah mengembangkan integrasi budaya dalam pengertian ideal.¹³ Di Indonesia hal tersebut dilakukan dengan memperkuat kearifan budaya lokal yang memuat ajaran-ajaran kebajikan bagi kehidupan berbangsa. Diantaranya ajaran *pela-gandong* di Maluku yang menjadi inspirasi bagi tentang bagaimana hidup secara harmonis dalam masyarakat yang beragam. Hal tersebut menyebabkan Indonesia diakui banyak negara sebagai negara multi etnis dan agama yang mampu menjaga rakyatnya hidup rukun dan damai. Keberagaman yang tumbuh di Indonesia tidak mungkin terjadi tanpa adanya sikap toleransi dan kebersamaan diantara kelompok-kelompok masyarakat. Perbedaan yang tetap menyatu dalam semangat kebangsaan tersebut merupakan salah satu modal pembangunan bangsa Indonesia.

2. Nilai bangsa

Kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama dan masyarakat yang majemuk di Indonesia merupakan komitmen politik pemerintah yang terus terpelihara. Indonesia adalah negara yang dibangun dengan kesadaran oleh dan dari berbagai unsur yang beraneka ragam sifat dan karakteristiknya untuk meraih tujuan dan kepentingan bersama.¹⁴ Bangsa Indonesia memiliki dasar negara yang digali dari nilai-nilai luhur bangsanya sendiri. Nilai-nilai luhur bangsa yang dimaksud merupakan nilai-nilai yang tumbuh dari budaya yang ada di Indonesia. Upaya menjaga kesatuan dan persatuan negara Indonesia dibangun berdasar kesepakatan membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekuatan pemersatu dari setiap gesekan etnis dan agama adalah kesepakatan menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.¹⁵ Berdasarkan Pancasila, kebebasan beragama, kesamaan hak warga semua agama sebagai warga negara dengan prinsip non-diskriminasi, dan hidup bersama umat-umat beragama lainnya secara damai dijamin negara. Arti penting Pancasila ada dalam prinsip saling menghormati. Hal ini merupakan modal penting kesatuan dan persatuan bangsa.

Berdasarkan Sumpah Pemuda yang kemudian diperkuat dengan Pancasila dan UUD 1945 dengan ciri kebangsaan Bhineka Tunggal Ika sepakat untuk hidup

¹² Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Graha Ilmu, 2008. hlm.125.

¹³ Ujiyanto Singgih Prayitno, "Integrasi Sosial Dalam Perspektif Struktural Fungsional : Dinamika Interaksi Masyarakat Multikultural Kota Ambon", dalam *Perlindungan Terhadap Umat Beragama: Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk*,

(penyunting Munajat), Jakarta; Pusat Penelitian BKD DPR dan Dian Rakyat, 2016. hlm 9.

¹⁴ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta; Pt Saadah Cipta Mandiri, 2012, hlm.11

¹⁵ Wawancara dengan Thamhid Masyudi, sekretaris pengurus wilayah Muhammadiyah Jatim pada tanggal 17 Mei 2017.

berdampingan bersama-sama dengan damai. Basis strategi integrasi nasional adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Pengalaman bangsa Indonesia mengajarkan bahwa bukan semangat kemanunggalan (*tunggal-ika*) yang berpotensi melahirkan persatuan kesatuan, melainkan pengakuan akan pluralitas (*kebhinekaan*). Selain itu juga kesediaan untuk menghormati kemajemukan.¹⁶

Suasana kondusif yang ada di Indonesia dapat terjadi karena adanya sinergi dan *political will* dari semua pihak untuk menjaga kerukunan.¹⁷ Meskipun kasus intoleransi di Indonesia masih ada, hal tersebut dapat dikatakan *segmented cases* karena *power relations* yang ada tidak seimbang antar agama yang ada di Indonesia.¹⁸ Berbagai peristiwa yang diduga mengganggu kebhinekaan menggugah masyarakat untuk kembali meneguhkan semangat kebangsaan.¹⁹ Toleransi dan harmoni dalam kehidupan beragama dapat tumbuh karena ada upaya bersama dari semua pihak untuk membangunnya dan kesadaran bahwa kebhinekaan merupakan milik bersama bangsa Indonesia.

Pemerintah Indonesia tetap menyadari pergesekan antar warga beda etnis dan agama dapat terjadi oleh karena itu upaya menjaga kerukunan penduduknya harus terus dilakukan. Kerukunan umat beragama merupakan salah satu pilar penting bagi suksesnya pembangunan nasional secara menyeluruh. Setiap pemerintah Indonesia berupaya agar kerukunan antar umat beragama tersebut lestari, sebab hal tersebut tidak terjadi dengan seketika, melainkan melalui proses yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pemerintah, dalam hal ini kementerian agama, secara berkala mengajak pemuka agama dari seluruh Indonesia bertemu dalam musyawarah nasional, misalnya Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa.²⁰ Forum tersebut membahas isu penting dan strategis terkait kerukunan antarumat beragama. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan bersama dari para pemuka agama dalam kelangsungan hidup berbangsa. Selanjutnya hasil kesepakatan

disosialisasikan dalam sarasehan yang digelar di berbagai wilayah Indonesia.

Toleransi dan saling menghargai perbedaan merupakan hasil dari terus diupayakannya dialog dan komunikasi yang merupakan kunci untuk memperkuat toleransi antar-umat beragama.²¹ Salah satu upaya Pemerintah adalah secara khusus membangun Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di bawah Kementerian Agama. Meskipun terdapat kritik bahwa pasca pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid program FKUB melemah menjadi bersifat simbolik, berbasis anggaran karenanya lebih ada dipermukaan bersifat *top down planning*.²² Pemerintah, baik pusat maupun daerah, mempunyai tanggung jawab bersama agar FKUB bisa menjalankan tupoksinya dengan baik. Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama pada 17 April 2006, Bab VIII pasal 73, anggaran belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB, didanai dari dan atas beban APBN untuk FKUB tingkat nasional. Didanai dari dan atas beban APBD provinsi untuk FKUB provinsi dan didanai dari dan atas beban APBD kabupaten/kota untuk FKUB tingkat Kabupaten/kota.

Kebijakan membangun FKUB berlanjut di daerah. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kegiatan FKUB terlaksana rutin. Selalu ada pertemuan di FKUB NTT membahas kondisi masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan untuk menjalin rasa persatuan. Di antaranya melalui kegiatan gerak jalan bersama dan lomba pidato antar siswa. Pemda secara rutin mengadakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) antar 5 pilar yaitu Gubernur/bupati, walikota, DPRD, Pangdam, Kapolda dan Kajati, dan tokoh masyarakat. Kerukunan terjadi juga diperkuat dengan adanya faktor kekerabatan, tradisi budaya, dan upaya Pemda menyelesaikan setiap bibit anti toleransi yang ada sedini mungkin.²³ Upaya membangun toleransi di NTT didukung adanya latar belakang sejarah, tradisi dan ikatan kekeluargaan. Hal tersebut terbawa dalam kebijakan Pemda yang tidak

¹⁶ Sultan Hamengku Buwono X, *merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta; PT Gramedia, 2007, hlm.14

¹⁷ Wawancara dengan Moh.Ersyad, Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam Kanwil Agama Jawa Timur pada tanggal 16 Mei 2017.

¹⁸ Wawancara dengan Baiq Wardhani, Kepala Program Studi S2 Hubungan Internasional Universitas Airlangga, pada tanggal 15 Mei 2017

¹⁹ "Kebhinekaan Milik Bersama", *Kompas*, 21 Februari 2018, hlm.4

²⁰ Isu Krusial Agama Dibahas, *Kompas* 9 Februari 2018, hlm.12

²¹ Tayseir M. Mandour, "Islam and Religious Freedom: Role of Interfaith Dialogue in Promoting Global Peace." *Brigham; Young University Law Review*. 2010, hlm. 884.

²² Wawancara dengan Sapto Wibowo, Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Mei 2017

²³ Wawancara dengan M. Marhaban, Kepala Dinas Agama Kabupaten Alor, pada tanggal 9 Agustus 2017.

segregasi dan tidak membangun kawasan pemukiman eksklusif untuk satu kelompok tertentu. Pemda NTT bersikap adil dalam mengayomi semua agama yang ada di wilayahnya. Pemda NTT juga berupaya membangun kerukunan dengan terus menerus melakukan sosialisasi; membuat iklan/baliho dan mengadakan kegiatan untuk memperkuat kerukunan, membangun kerja sama dengan pihak keamanan dan pemuka agama.²⁴

Sementara di Jawa Timur dalam upaya menjaga toleransi dan harmoni kehidupan bermasyarakat, Pemda Jawa Timur secara rutin mengadakan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOMPINDA) antar 5 pilar yaitu Gubernur/bupati, walikota, DPRD, Pangdam, Kapolda dan Kajati, dan tokoh masyarakat. Pertemuan di tingkat teknis akan semakin sering dilakukan menjelang dan pra pilkada/pilleg dan pilpres. Baik Pemda Jatim dan NTT mengaktifkan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang merupakan bentukan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan berupa pembinaan hubungan antar umat beragama dalam bentuk dialog/musyawarah melibatkan tokoh masyarakat dan agama. Pemda juga menghormati kearifan lokal, sifat gotong royong, musyawarah mufakat, menghidupkan kebudayaan dan kesenian daerah, dan terlebih dahulu berupaya melakukan menyelesaikan perselisihan secara adat sebelum pidana. Organisasi keagamaan seperti Nadhatul Ulama dan Muhammadiyah juga secara aktif berupaya menjaga kerukunan dengan secara *bottom up* dari grassroot yang mereka bangun.²⁵

3. Daya Tarik positif

Indonesia yang rukun dalam keberagaman menjadi modal diplomasi Indonesia berperan dalam membangun perdamaian dunia. Indonesia kerap menjadi negara contoh dalam membangun toleransi dan harmoni, banyak negara ingin bekerjasama belajar dari Indonesia.²⁶ Hal ini menjadi aset *soft power*

diplomasi dan berpengaruh positif pada posisi Indonesia dalam forum-forum internasional.²⁷ Dengan aset tersebut Indonesia turut berperan membantu menciptakan solusi damai pada masalah konflik di dunia.²⁸ Indonesia meyakini dialog merupakan cara terbaik untuk mencegah konflik dan perbedaan, terutama potensi konflik agama dan etnis yang terjadi di era globalisasi. Dialog merupakan salah satu alat untuk mendapatkan kesepakatan perdamaian dan menjadi strategi Indonesia dalam membantu menyelesaikan solusi permasalahan dunia.²⁹ Indonesia negara multi etnis yang toleran dan harmonis menjadi citra positif. Setiap negara memiliki citra berbeda dalam perspektif para pemangku kepentingan internasional.³⁰ Citra positif membantu meningkatkan *soft power* negara tersebut.³¹ Citra bangsa tersebut menjadi pembeda antar negara dengan tujuan kompetitif dalam era globalisasi. Banyak negara telah menyadari pentingnya mengembangkan citra bangsa sebagai cara untuk sarana membangun ekonomi, sosial budaya dan politik. Citra bangsa positif menjadi strategi pemasaran yang menarik bagi para pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk bekerja sama demi kepentingan nasional.³² Hal tersebut menjadi strategi atau alat dalam kompetisi untuk meraih perhatian dan kemakmuran, serta alat penegeasan diri bangsa dibandingkan negara lain. Diplomasi *soft power* dalam hal tersebut terus dilakukan dalam bentuk kerja sama *interfaith dialogue*. Selain Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, Presiden Indonesia juga memiliki utusan khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban yaitu Din Syamsudin.

Dialog Lintas Agama merupakan kegiatan *soft power* yang banyak menarik minat negara lain untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam mengedepankan sikap toleransi dan saling memahami antar sesama umat beragama dan antar peradaban. Upaya pro-aktif Indonesia ini ditargetkan untuk

²⁴ Wawancara dengan Yohanes B., Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Agama NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017.

²⁵ Wawancara dengan Rubaidi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur, pada tanggal 18 Mei 2017

²⁶ "Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Dewan Eropa," 19 November 2014, (online) (<http://indonesianconsulate.ae/indonesia/2014/11/20/pertemuan-antara-presiden-republik-indonesia-dengan-presiden-dewan-eropa/> diakses 15 Maret 2017).

²⁷ Dewi Fortuna Anwar, "The Impact Of Domestic And Asian Regional Changes On Indonesian Foreign Policy", *Southeast Asian Affairs*; Singapore, 2010, hlm.126-141.

²⁸ "Kebinekaan Jadi Modal Indonesia bagi Dunia", *Kompas*, 22 Maret 2017, hlm.8

²⁹ Menlu RI: Perdamaian Bukan Hadiah, 30 November 2017, (online), (<http://internasional.metrotvnews.com//VnNlAJN-menlu-ri-perdamaian-bukan-hadiah>, diakses 27 Februari 2018)

³⁰ Ying Fan, "Branding the nation: what is being branded?" *Journal of Vacation Marketing*, 12:1, 2006, hlm. 5-14.

³¹ Yin Fang, *Soft Power: Power of Attraction or Confusion*, London; Palgrave Macmillan, 2008, hlm. 147-158.

³² Virimai V Mugobo dan Wilfred I Ukpere, "Is Country branding a panacea or poison?" *African Journal of Business Management: Victoria Island* 5.20, 16 September 2011, hlm. 8248-8255.

melawan *stereotype negative* tentang Islam yang berkembang di Barat di mana terdapat anggapan bahwa Islam berada dibalik berbagai aksi terorisme. Dialog lintas agama menampilkan Indonesia sebagai negara multikultur yang hidup bertoleransi dan harmoni, sekaligus memberikan kontribusi demi terciptanya "*harmony among civilizations*". Kegiatan dialog lintas agama melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu tokoh agama, masyarakat madani, akademisi, media, dan generasi muda. Melalui dialog lintas agama yang akan dilakukan, Indonesia dapat saling bertukar pengalaman dengan negara mitra mengenai pluralitas dan harmoni antar peradaban, serta diharapkan akan tercipta berbagai kerja sama di bidang dialog lintas agama.

Sejak tahun 2004, Kementerian Luar Negeri bekerjasama dengan Kementerian Agama membawa agenda ini secara internasional dalam rangka kerjasama bilateral, regional dan global. Saat ini, di Indonesia telah berdiri lebih dari 400 forum *Inter-Religious Harmony*. Di lingkup bilateral, Indonesia telah terlibat secara bilateral dengan lebih kurang 25 negara dalam pelaksanaan *interfaith dialogue* dan *intercultural dialogue* selama kurun waktu sepuluh tahun.³³ Di lingkup regional, sejak tahun 2004 Indonesia dengan sungguh-sungguh menginisiasi pelaksanaan *Asia Pacific Regional Interfaith Dialogue* (APRID), dan sejak tahun 2005 melaksanakan *Asia – Europe Meeting* (ASEM) *Interfaith Dialogue*.

Indonesia berperan aktif dalam forum multilateral melalui *United Nations Alliance of Civilization* (UNAOC) untuk mengembangkan kerukunan agama serta toleransi budaya. Pada Agustus 2014, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan The 6th Global Forum of UNAOC atas capaian Indonesia yang dinilai tepat untuk menggambarkan kehidupan antar umat beragama dalam kerangka mencari solusi berbagai tantangan global, serta latar belakang Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar menjadi daya tarik tersendiri dalam pembahasan menjembatani berbagai perbedaan, seperti dunia Barat dan dunia Islam.³⁴ Indonesia juga aktif dalam sejumlah organisasi, di antaranya *the Bali Democracy Forum* (BDF). Indonesia menjadi inisiator BDF guna

membantu mewujudkan terbentuknya tata bangun demokrasi di kawasan melalui praktik *sharing of experiences and best practices* dengan menganut prinsip-prinsip persamaan, saling pengertian dan menghargai. Indonesia juga aktif dalam *Global Inter-Media Dialogues; International Conference on Islamic Scholars and the New Asia Africa Strategic Partnership (NAASP) International Conference on the Capacity Building for Palestine*.³⁵

B. *Soft Power* Indonesia dalam Diplomasi Isu Rohingya

Indonesia memiliki ikatan hubungan dengan Myanmar yang telah terbentuk masa awal kemerdekaan, sejak presiden pertama Indonesia Presiden Sukarno dengan PM U Than. Pendekatan bilateral Indonesia terhadap Myanmar dilakukan dengan pelibatan konstruktif (*constructive engagement*) sebagai upaya persuasif mendekati Pemerintah Myanmar. Dalam strategi ini Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dan menjadi mitra Myanmar dengan tidak menjauhi negara atau mengecam negara tersebut. Pendekatan yang dilakukan Indonesia ini mengedepankan konsensus dan menghindari konfrontasi dengan semangat inklusif dan persuasif.³⁶ Myanmar merupakan rumah bagi hampir satu juta orang warga Rohingya. Namun sebagai minoritas, minoritas muslim Rohingya masih dianggap sebagai imigran gelap dari Bangladesh.

Berdasarkan undang-undang kewarganegaraan Myanmar sejak tahun 1982, Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Etnis Bengali di negara bagian Rakhine harus membuktikan mereka sudah tinggal di Myanmar sebelum 1823 untuk mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar. Syarat ini secara efektif membuat etnis Rohingya tak bisa mendapatkan status warga negara Myanmar. Peraturan tersebut menjadi salah satu dasar Amnesty Internasional menyebut Myanmar menerapkan politik Apartheid terhadap Rohingya. Kewarganegaraan Myanmar yang dengan susah payah didapat etnis Rohingya tersebut juga mudah hilang dengan berbagai alasan sepele. Warga Rohingya yang kembali tidak memiliki kewarganegaraan diperlakukan sebagai ilegal imigran yang diburu aparat untuk dideportasi.

³³ Albusyra Basnur, "Diplomasi Mengelola Keragaman Dan Mempromosikan Toleransi", *Tabloid Diplomasi*, edisi Desember 2014.

³⁴ "Rencana Strategis Tahun 2015—2019 Kementerian Luar Negeri", (*online*) (<https://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf> diakses 14 Februari 2018.) hlm.9

³⁵ "*Soft Power* Indonesia dalam Pembangunan Asia", 17 Januari 2011, (*online*) (<https://news.detik.com/berita/1548031/soft-power-indonesia-dalam-pembangunan-asia?nd991103605>), diakses 10 Oktober 2017)

³⁶ Fan Hongwei, "ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar", *China International Studies*, April 2012, hlm. 11.

Tanpa kewarganegaraan mereka tidak bebas bergerak apalagi bekerja.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut Rohingya sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.³⁷ Meskipun pemerintah Myanmar telah berganti, namun pelanggaran HAM dan tragedi kemanusiaan terus terjadi terhadap Muslim Rohingya di negara bagian Rakhine. PBB memiliki bukti aksi kebrutalan militer Myanmar terhadap warga muslim Rohingya di tahun 2016 dan 2017, dan mengkategorikannya sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan pembersihan etnis (genosida). Menurut Badan Pengungsi PBB (UNHCR) hingga 8 September 2017, konflik Rakhine telah menewaskan lebih dari 1000 orang dan menyebabkan lebih dari 313.000 orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Para pengungsi Rohingya tersebut tidak lagi bertempat tinggal karena militer Myanmar membakar rumah mereka. Melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine tersebut Indonesia harus bertindak untuk mencari solusi damai.

Selain kedekatan sejarah dengan Myanmar, Indonesia tidak dapat berdiam diri melihat tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. *Pertama*, Isu Rohingya berpengaruh pada stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Pecahnya konflik Rohingya di Negara Bagian Rakhine telah memicu mengalirnya ribuan suku Rohingya ke Asia Tenggara dan Asia Selatan. Pengungsi Rohingya yang mengalir ke Asia Tenggara memicu berkembangnya jaringan penyelundupan dan perdagangan manusia, khususnya di Thailand. Aliran pengungsi Rohingya juga masuk ke Indonesia yang telah menampung sekitar 12.000 warga Rohingya yang mengungsi sejak 2015. Meski bukan penandatanganan Konvensi Internasional mengenai Status Pengungsi 1951, Pemerintah Indonesia mengikuti prinsip *non-refoulement* yang melarang penolakan atas pengiriman pengungsi atau pencari suaka ke wilayah tempat kebebasan karena hidup mereka terancam oleh alasan-alasan tertentu seperti alasan ras, agama, atau kebangsaan. Namun mengalirnya pengungsi Rohingya ke beberapa daerah membebani anggaran pemerintah daerah tempatan karena tidak memiliki kewenangan dan kewajiban untuk mengurus mereka maka tidak memiliki anggaran untuk itu. Kompleksitas yang dihadapi para manusia perahu ini memang membuat negara-negara tempat terdamparnya tidak mudah untuk mengambil

keputusan. Ada hukum internasional yang harus dipatuhi, selain menjaga kedaulatan diplomasi masing-masing negara.

Di lingkup regional, masuknya pengaruh kelompok radikal garis keras atas nama solidaritas muslim dan tumbuhnya terorisme di Myanmar, telah memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan Myanmar sebagai negara tujuan baru bagi kelompok ekstremis di Indonesia dan negara-negara lain yang akan berjihad ke luar negeri. Telah ada seruan-seruan dari kelompok-kelompok di Indonesia yang terafiliasi dengan ISIS dan tersebar lewat pesan-pesan dalam aplikasi chat Telegram, mereka "akan menjadikan Myanmar sebagai Suriah kedua". Sudah ada front jihad yang didirikan oleh Al Qaida di sana, dan kelompok terafiliasi ISIS bersaing untuk juga ikut terlibat di Myanmar. Terbentuknya front terorisme baru di Asia Tenggara akan mengancam stabilitas keamanan dan perdamaian ASEAN dan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan di Asia Tenggara.

Kedua, di dalam negeri tragedi kemanusiaan Rohingya di Rakhine telah menjadi isu politik yang mengundang reaksi keras dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pemerintah Indonesia sebagai negara muslim terbesar diminta segera bertindak membantu perdamaian Rohingya di Myanmar. Berbagai kelompok massa menggelar aksi bela Rohingya tidak hanya di kedutaan Myanmar. Gedung kedutaan besar Myanmar di Jakarta menjadi sasaran pelemparan bom molotov oleh orang tak dikenal. Beberapa ormas keagamaan sempat berkeinginan melakukan aksi bela Rohingya di kawasan candi Borobudur dan mengirim kadernya untuk jihad di Myanmar. Marak terjadi aksi pengumpulan donasi kemanusiaan untuk Rohingya secara sukarela di berbagai daerah.

1. Agenda diplomasi soft power Indonesia

Pemerintah Indonesia menggunakan pendekatan *soft power* diplomasi dan menghindari pendekatan *megaphone diplomasi*. Diplomasi Indonesia dilaksanakan secara halus tanpa paksaan sehingga Pemerintahan Myanmar mau membuka diri terhadap Indonesia. Pemerintah Indonesia menanggapi aksi kekerasan di negara bagian Rakhine di Myanmar pada 25 Agustus 2017. Konflik antara ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) dengan militer Myanmar telah mengakibatkan ribuan warga Rohingya

³⁷ A.guest, "Who are the Rohingya refugees?", (online), (<https://www.amnesty.org.au/who-are-the-rohingya-refugees/> diakses: 4 January 2017).

harus meninggalkan rumah mereka. Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo, menyampaikan beberapa pernyataan, pertama menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi. Kedua, mendorong aksi nyata dalam penyelesaian konflik ini, buka sekedar kecaman. Ketiga, pemerintah Indonesia berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional. Keempat, menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State. Selanjutnya, Indonesia mengirimkan bantuan obat, makanan, dan membangun sekolah dan rumah sakit.

Indonesia berupaya aktif melakukan berbagai upaya untuk membantu penyelesaian krisis di berbagai negara, termasuk di Rakhine State, Myanmar. Indonesia memprakarsai upaya membangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk di Myanmar dan Bangladesh. Melalui diplomasi Formula 4+1 yaitu:

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan
2. Menahan diri semaksimal mungkin untuk tidak menggunakan kekerasan
3. Perlindungan bagi semua warga tanpa memandang agama dan suku,
4. Membuka akses untuk menerimabantuan kemanusiaan.

Disamping itu, Indonesia juga mendorong implementasi dari rekomendasi yang diusulkan dalam *Kofi Annan Report*. Formula 4+1 yang ditawarkan Indonesia mendapatkan apresiasi yang tinggi dari berbagai negara.

Indonesia berupaya menjadikan toleransi dan harmoni yang berkembang di Indonesia sebagai *lesson learn* kepada Myanmar. Hal tersebut dilakukan karena kedua negara mempunyai kesamaan, di antaranya sama-sama memiliki penduduk dengan agama dan budaya yang beragam. Indonesia memiliki lebih dari 350 etnis, sedangkan Myanmar memiliki 135 etnis. Indonesia meyakini faktor penting terciptanya toleransi dan harmoni di masyarakat adalah kemauan

untuk menghormati perbedaan.³⁸ Indonesia dapat berbagi pengalaman *best practices* tentang sejumlah kegiatan yang memperkuat toleransi dan keharmonisan, terutama pelaksanaan dialog lintas agama di antara komunitas agama. Dalam dialog tersebut individu dapat berbagi keyakinan pribadi melalui dialog non-koersif,³⁹ karena sifat dialog antar agama ini berbagi dan membangun kesepemahaman.⁴⁰ Dengan demikian diharapkan tumbuh rasa saling menghormati dan pada akhirnya perdamaian. Hal tersebut juga merupakan salah satu cara untuk menekan dan memerangi paham radikalisme dan ekstremisme. Indonesia telah merancang beberapa program dialog antar agama untuk Myanmar. Terutama dalam konteks dialog antar organisasi Muslim dan Budha. Pada bulan Januari 2017 Myanmar mengirimkan delegasi awal ke Indonesia untuk melakukan *capacity building* dan berbagai pelatihan proses demokratisasi dan konsiliasi. Dilanjutkan dengan kedatangan delegasi dialog antaragama Myanmar-Indonesia yang pertama (*The 1st Indonesia-Myanmar Interfaith Dialogue - IMID*) di bulan Mei 2017. *The 1st IMID* diselenggarakan di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 21-24 Mei 2017. Dihadiri oleh sekitar 20 orang yang terdiri dari delegasi Myanmar, delegasi Indonesia, serta para peserta aktif antara lain para Biku dari Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Smarattungga Boyolali, Kantor Wilayah Kementerian Agama Yogyakarta, serta para Pejabat Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Delegasi dari Myanmar yang turut berpartisipasi pada the 1st IMID adalah Mr. Khin MaungTu, *Member of Board of Trustees*, Shwe Dagon Pagoda; Mr. Tha Nyan, *General Secretary, Interfaith Group of Myanmar*; dan Mr. Nyunt Maung Shein, *President of the Islamic Religious Affairs Council*. Dalam pertemuan tersebut kedua negara membangun mekanisme inovatif untuk mempromosikan pluralisme dan toleransi, upaya memerangi prasangka buruk antar pemeluk agama, dan membangun kondisi yang kondusif untuk perdamaian jangka panjang.⁴¹

Upaya membangun toleransi dan harmoni dalam masyarakat dapat berhasil bila ada *goodwill* dari

³⁸ Jonathan Napier, "Interfaith Dialog Interfaith Dialogue Theory and Native/Non-Native Relations", *Jurnal Illumine*, Vol 10, No 1 tahun 2011, hlm. 77 – 87.

³⁹ Brice H. Balmer, *Meeting our Multifaith Neighbors*, Waterloo: Herald Press, 2006, hlm.104.

⁴⁰ Ewert H. Cousins, "Interreligious Dialogue: The Spiritual Journey of Our Time," *Interreligious Dialogue: Voices From a New Frontier*, ed. M. Darrol Bryant and Frank Flinn, New York: Paragon House, 1989, hlm.6.

⁴¹ "Dialog Lintas Agama Indonesia – Myanmar Peran Pemimpin Agama Dalam Mempromosikan Toleransi dan Harmoni" *Tabloid Diplomasi*, Mei 2017, (online) (<http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2017/07/12/dialog-lintas-agama-indonesia-myanmar-peran-pemimpin-agama-dalam-mempromosikan-toleransi-dan-harmoni/> diakses 13 Februari 2018).

pemerintah.⁴² Hal ini yang tampaknya belum terjadi di Myanmar. Pemerintah Myanmar masih mengacu Rohingya sebagai orang Benggama, yang berarti mereka termasuk di Bangladesh. Saat ini mayoritas pejabat pemerintah, politisi oposisi, pemuka agama dan bahkan aktivis hak asasi manusia lokal di Myanmar masih secara bersama masih menganggap Rohingya bukanlah warga negara Myanmar. Meski telah hidup selama beberapa generasi di Myanmar, Rohingya, yang berbicara dalam bahasa Bengali cenderung dianggap berbeda dari sebagian besar kelompok etnis Myanmar lainnya. Meskipun banyak warga Rohingya dianggap sebagai warga negara ketika Myanmar ketika negara tersebut merdeka pada tahun 1948, junta militer yang merebut kekuasaan pada tahun 1962 mulai melucuti hak-hak mereka. Dimulai dengan Undang-Undang Imigrasi Darurat 1974, dan akhirnya dengan Undang-Undang Warga Negara 1982, orang-orang Rohingya ditolak kewarganegaraannya di Myanmar. Bahkan nama Rohingya telah diambil dari mereka.

Meski telah terbentuk *interfaith group of Myanmar*, upaya pembauran di kalangan masyarakat Myanmar tidak mudah dilaksanakan. Selain karena latar belakang sejarah, perbedaan fisik dan agama dengan mayoritas penduduk Myanmar menjadi alasan menanamkan *politic of denial* terhadap Rohingya. Dalam beberapa kesempatan pemerintah Myanmar masih menyebut etnis Rohingya "Bengal" merujuk kepada asal Rohingya dari Bangladesh. Dari berbagai pernyataan Pemerintah Myanmar belum tampak upaya untuk menganggap suku Rohingya sebagai bagian dari Myanmar. Terlihat dalam sikap pasif tokoh politik penting Myanmar, Aung San Suu Kyi yang memilih menggunakan istilah "muslim yang tinggal di Rakhine Utara" karena menolak menggunakan istilah Rohingya. Kebijakan Suu Kyi tersebut meneruskan kebijakan Bapak bangsa Myanmar Aung Than yang juga merupakan orang tuanya. Masyarakat Myanmar cenderung menyebut mereka *kalar* sebuah julukan yang digunakan untuk semua Muslim di Myanmar yang identik dengan kekerasan sehingga tidak mungkin dapat hidup berdampingan secara damai.⁴³

Upaya membangun dialog damai semakin sulit terwujud dengan terjadi pembunuhan terhadap U Ko Ni, pengacara muslim penasehat Penasihat hukum

untuk partai penguasa Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang didirikan Aung San Suu Kyi. U Ko Ni merupakan anggota delegasi Myanmar yang baru saja menghadiri pertemuan kepemimpinan senior di Habibie Centre, Jakarta, Indonesia. Pembunuhan ini menambah ketegangan antara warga lokal Budha dan minoritas Muslim di tengah-tengah operasi militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine. U Ko Ni telah berulang kali menyebut militer masih memegang kendali pemerintahan Myanmar, meski partainya yang dipimpin Aung San Suu Kyi berkuasa.⁴⁴ Sentimen masyarakat terhadap Rohingya, yang jumlahnya sekitar 4 persen dari populasi Myanmar, telah menyebar melampaui negara bagian Rakhine. Pada Pemilu 2015, tidak ada partai politik besar yang memiliki seorang calon Muslim sehingga tidak ada Muslim yang menjadi wakil rakyat di Parlemen saat ini. Hal ini pertama kali sejak kemerdekaan negara Myanmar. Pemerintah Myanmar menolak tuduhan genosida terhadap orang Rohingya di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih lanjut pemerintah Myanmar memblokir akses bantuan kemanusiaan PBB ke wilayah Rohingya demi mencegah penduduk sipil di zona konflik menerima makanan, air dan obat-obatan.

Kebijakan Pemerintah Myanmar tersebut di atas sangat berbeda dengan Pemerintah Indonesia, Pemda NTT dan Jawa Timur, dimana upaya menjaga kerukunan adalah tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat, yang terus dilakukan melalui berbagai sosialisasi dan kegiatan. Perjanjian perdamaian anti SARA yang hanya terbangun di kalangan pemerintah Myanmar tidak akan berarti tanpa adanya sosialisasi dan pembiasaan dari pemerintah tersebut kepada masyarakatnya karena masyarakat berperan sangat besar untuk membangun kerukunan nasional.

2. Instrumen diplomasi soft power Indonesia

Soft power, berupaya untuk membuat sebuah negara melakukan apapun yang diinginkan tanpa merasa terpaksa ataupun memakai bujukan dengan menggunakan *public diplomacy*, atau diplomasi ke masyarakat. Karena menggunakan kekuatan budaya, *soft power* membutuhkan sebuah medium yang tepat.

⁴² Wawancara dengan Rubaidi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 2017

⁴³ Hannah Beechoct, "Across Myanmar, Denial of Ethnic Cleansing and Loathing of Rohingya", 24 Oktober 2017, (*online*), (<https://www.nytimes.com/2017/10/24/world/asia/myanmar-rohingya-ethnic-cleansing.html?module=ArrowsNav&contentCollection=Asia%20Pacific&action>

=keypress®ion=FixedLeft&pgtype=article, diakses 12 Februari 2018)

⁴⁴ "Pengacara Muslim Myanmar Dibunuh karena Agama?", 30 Januari 2017, (*online*), (<https://dunia.tempo.co/read/841005/pengacara-muslim-myanmar-dibunuh-karena-agama>, diakses 21 Februari 2018).

Medium tersebut harus mampu melaksanakan diplomasi ke masyarakat. Diplomasi masyarakat digunakan untuk mempengaruhi opini publik.

a. Bantuan Kemanusiaan

Indonesia berkomitmen membantu proses demokrasi di Myanmar dengan cara mendukung upaya Myanmar dalam mewujudkan reformasi, rekonsiliasi, dan pembangunan inklusif di Myanmar. Strategi Indonesia agar solusi tersebut dapat diterima oleh pemerintah Myanmar dimulai dengan memberikan bantuan kemanusiaan (*humanitarian assistan*). Indonesia telah memberikan bantuan berupa pembangunan empat buah sekolah senilai USD 1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine State yang diresmikan pada tahun 2014, 10 buah kontainer berisi makanan dan pakaian yang diluncurkan oleh Presiden RI pada Desember 2016, serta pembangunan dua buah sekolah di Sittwe, Rakhine State yang diresmikan pada bulan Januari 2017.⁴⁵ Indonesia juga berupaya menarik ASEAN peduli kepada isu Rohingya, dimulai dengan pemberian bantuan kemanusiaan. ASEAN *Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster management* (AHA Centre) menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Rakhine State, Myanmar.⁴⁶ Bantuan tersebut merupakan refleksi dari persahabatan dan perhatian negara-negara ASEAN terhadap setiap anggotanya.

Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan ke Rohingya sebagai bagian dari kebijakan luar negeri. Hal ini merupakan bagian dari pendekatan sosial dan ekonomi di bidang kesejahteraan. Masyarakat atau negara yang kurang sejahtera tentu saja lebih rawan konflik dan kekerasan serta tidak terlalu peduli atas isu dan seruan perdamaian. Maka untuk mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah membantu masalah kesejahteraan masyarakat Myanmar. Implementasi dari strategi pelibatan konstruktif Indonesia di Myanmar lainnya adalah pembangunan inklusif di Myanmar, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kewirausahaan, demokrasi dan pemerintahan.

b. Bantuan Sekolah

Indonesia telah memberikan bantuan bernilai satu juta dolar untuk pembangunan empat sekolah di daerah Sittwe. Pendekatan budaya melalui kegiatan *interfaith dialogue* merupakan sarana pembauran di sekolah yang akan membantu menghapus pengalaman buruk di masa lalu untuk membangun masa depan negara yang lebih baik dan bersatu.⁴⁷ Sebagaimana pengalaman yang dilakukan di NTT, *interfaith dialogue* melalui pembauran di sekolah membantu terbentuknya pemahaman dan keinginan untuk membangun masa depan negara yang lebih baik dan bersatu.⁴⁸ Atas dasar pemahaman budaya dan karakteristik masyarakat yang lebih baik bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif dalam mewujudkan perdamaian. Keterbatasan Rohingya menyebabkan banyak anak Rohingya yang tidak bisa berbahasa Myanmar dan budaya mereka tidak dikenal. Keterbatasan Rohingya menyebabkan banyak anak Rohingya yang tidak bisa berbahasa Myanmar dan budaya mereka tidak dikenal. Pembangunan sekolah yang menggunakan bahasa resmi Myanmar,⁴⁹ merupakan cikal bakal *peace building* dan strategi yang tepat untuk membangun pembauran terhadap generasi muda. Oleh karena itu, fasilitas pendidikan tersebut tidak hanya ditujukan bagi anak-anak kelompok Rohingya, yang mayoritas Muslim dan tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar, tetapi juga bagi anak-anak etnik Rakhine, yang mayoritas beragama Buddha. Melalui pendidikan, generasi muda diajak untuk saling memahami perbedaan budaya, berbagai situasi kelompok masing-masing sehingga akan timbul pengertian di antara kelompok-kelompok yang bertikai.

Bantuan pembangunan di bidang pendidikan dalam diplomasi kemanusiaan Pemerintah Indonesia ini juga pernah dilakukan Indonesia dalam menengahi konflik di Pathani Thailand dan Moro di Filipina. Sebagai contoh, pembangunan pendidikan yang dilakukan organisasi Islam NU dan Muhammadiyah berperan baik mewakili Pemerintah Indonesia untuk mendekati masyarakat setempat. Peran serta diplomasi kedua ormas Islam ini kemudian

⁴⁵ "Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan", 31 Agustus 2017, (*online*) (<https://www.kemlu.go.id/id/tentang-kemlu/struktur-kemlu/Default.aspx>, diakses 26 Februari 2018).

⁴⁶ Berupa tenda untuk keluarga, peralatan untuk keluarga, perlengkapan kebersihan pribadi, peralatan dapur, generator listrik, peralatan listrik, perahu aluminium bermesin dilengkapi peralatan pendukung, dan peralatan pencahayaan dengan dilengkapi generator.

⁴⁷ Wawancara dengan Yohanes B. Seja, Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Agama NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017

⁴⁸ Wawancara dengan Yohanes B. Seja, Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Agama NTT, pada tanggal 7 Agustus 2017

⁴⁹ Larry A. Samovar dkk, *Komunikasi Lintas Budaya*, terjemahan Indri Margaretha Sidabalok, Singapura; Cengage Learning Asia, 2010, hlm.269.

ditindaklanjuti pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberi beasiswa kepada murid-murid Pattani/ Moro untuk belajar di Indonesia.⁵⁰ Bagi ormas agama ini merupakan bagian dari syiar Islam sehingga, semua dilakukan tanpa melihat perbedaan SARA dari masyarakat penerima bantuan.⁵¹ Pemimpin dan tokoh-tokoh pemikir utama dari ormas tersebut juga terlibat dalam berbagai pertemuan interfaith dialog mengenai topik yang mudah menjadi bibit konflik, *Islamophobia* dengan memberikan penjelasan yang bertujuan saling memahami. Hasilnya menjadi rekomendasi bagi pemerintah Indonesia dan pihak-pihak yang bertikai untuk mencari solusi damai.⁵²

c. Bantuan Rumah Sakit

Indonesia membangun Rumah Sakit Indonesia lengkap dengan perumahan untuk dokter dan perawat di Mrauk U, Rakhine, Myanmar. Rumah sakit senilai 1,8 juta dolar ini merupakan hasil kontribusi pemerintah Indonesia, Palang Merah Indonesia PMI, berbagai LSM dan juga sektor swasta.⁵³ Pembangunan rumah sakit Indonesia di Myaung Bwe, Negara Bagian Rakhine, Myanmar, merupakan salah satu upaya dalam menciptakan proses rekonsiliasi atas tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya. Sejak awal pembangunan, tenaga kerja yang diambil merupakan penduduk lokal agar dapat menjembatani perdamaian antara masyarakat Budha dan Muslim. Rumah Sakit Indonesia tersebut akan beroperasi secara inklusif dengan tidak memandang latar belakang, suku maupun agama, bagi seluruh masyarakat setempat. Indonesia berupaya pembangunan rasa percaya antar kelompok masyarakat dapat diupayakan melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Kebijakan ini merupakan proses *trust building* pada kelompok masyarakat yang diharapkan dengan sendirinya akan menciptakan saling pengertian.

3. Teknik pelaksanaan diplomasi *soft power* Indonesia

Dalam implementasinya diplomasi kemanusiaan Indonesia dilaksanakan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk membangun sarana sosial di negara konflik. LSM semakin berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan, baik secara langsung maupun sebagai mitra karena memiliki kelebihan dibanding organisasi internasional atau pemerintah asing. Sebagai contoh, mereka kurang dibatasi oleh kendala politik dan lebih mandiri sehingga memungkinkan mereka bekerja di tempat yang sangat sulit. Dalam diplomasi *soft power* peran hubungan antar masyarakat atau P to P sangat penting karena lebih diterima masyarakat di lokasi yang dibantu. Lembaga swadaya masyarakat bergerak membantu dimulai dengan memberikan kemanusiaan, bantuan kesehatan dilanjutkan dengan membuka pendidikan, kemudian membantu menggerakkan ekonomi.

Sebagai elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia, bantuan kemanusiaan dilaksanakan dengan mengedepankan sejumlah *added value*. Dalam hal ini, pelaksanaan bantuan kemanusiaan menumbuhkan berkontribusi terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, serta membangun kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terkena dampak.⁵⁴ Dalam bantuan kemanusiaan untuk Rohingya, Indonesia kembali menunjukkan adanya sinergi yang baik antara Pemerintah sebagai aktor negara dan organisasi sosial kemasyarakatan sebagai aktor non-negara dalam menjalankan komitmen Indonesia memberikan dukungan kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan. Krisis yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, telah menarik perhatian masyarakat Indonesia. Merespon hal tersebut, kementerian Luar Negeri Indonesia membuat Program bernama *Humanitarian Assistance for Sustainable Community* (HASCO) untuk

⁵⁰ Wawancara dengan Thamhid Masyudi, sekretaris pengurus wilayah Muhammadiyah Jatim, pada tanggal 17 Mei 2017.

⁵¹ Abdulfatah Said Mohamed and Ronald Oferinger, ""Rahmatan lil-'alamin" (A mercy to all creation): Islamic voices in the debate on humanitarian principles" *International Review of the Red Cross*; Cambridge Vol. 97, Iss. 897-898, (Jun 2015): 371-394. DOI:10.1017/S1816383115000697

⁵² Wawancara dengan Rubaidi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur pada tanggal 18 Mei 2017 dan Thamhid Masyudi – sekretaris Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jatim pada tanggal 17 Mei 2017.

⁵³ "Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit di Rakhine, Myanmar", (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/15285611/indonesia-mulai-bangun-rumah-sakit-di-rakhine-myanmar>, diakses 14 Desember 2018)

15285611/indonesia-mulai-bangun-rumah-sakit-di-rakhine-myanmar, diakses 14 Desember 2018)

⁵⁴ Kementerian Luar Negeri memiliki rencana pembentukan *single agency* bagi bantuan Indonesia ke luar negeri. Pembentukan *single agency* tersebut dapat menguatkan, antara lain, modalitas diplomasi kemanusiaan Indonesia karena berkesinambungan dan bersifat memberdayakan masyarakat terkenda dampak. "Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Kedepankan Sinergi Seluruh Elemen Pemerintah dan Masyarakat", 10 Februari 2018, (*online*) (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Diplomasi-Kemanusiaan-Indonesia-Kedepankan-Sinergi-Seluruh-Element--Pemerintah-dan-Masyarakat-.aspx>, diakses 15 Februari 2018).

membantu masyarakat di Rakhine.⁵⁵ Dalam membantu penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya yang terjadi di Rakhine, Pemerintah Indonesia membentuk Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). AKIM memiliki empat program bantuan, yakni kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan bantuan dasar. Rencananya, aliansi ini akan berjalan selama dua tahun dan bisa diperpanjang jika dibutuhkan. AKIM akan bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan yang berada di Rakhine. Hal ini dilakukan, karena berdasarkan ketentuan yang dibuat pemerintah Myanmar, setiap badan yang ingin memberikan bantuan harus melalui organisasi lokal. Dengan kerjasama tersebut pemberian bantuan Indonesia menjadi legal, resmi, terbuka sehingga bisa menembus daerah rawan yang selama ini tertutup. Bantuan Indonesia bersifat inklusif untuk semua komunitas tidak memiliki muatan SARA. Bantuan Indonesia bersifat inklusif untuk semua komunitas tidak memiliki muatan SARA.

Indonesia melalui program HASCO memberikan bantuan bagi rakyat Myanmar, khususnya di Rakhine State, dalam bidang peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli, *livelihood*, dan pemulihan. Salah satu strategi AKIM untuk membangun toleransi dan harmoni di Myanmar adalah membangun pasar karena menjadi tempat pertemuan antarkomunitas. Program yang merupakan komitmen dari sebelas organisasi sosial kemasyarakatan ini akan dilaksanakan selama dua tahun dengan dana bantuan senilai 2 juta USD tersebut didapat dari donasi masyarakat Indonesia yang telah terkumpul melalui lembaga anggota AKIM.⁵⁶ Bantuan ke Rakhine State ini merupakan model bantuan internasional yang partisipatif dan inklusif. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh *Advisory Commission on Rakhine State* yang dipimpin oleh Kofi Annan.

PENUTUP

Indonesia adalah negara heterogen yang mampu menjaga stabilitasnya. Keunggulan Indonesia ini diakui dunia dan menjadikannya sebagai rujukan negara multietnik yang berhasil. Hal ini yang kemudian membuat Indonesia memiliki kemampuan untuk melaksanakan diplomasi *soft power* yang bertumpu pada aset keragaman kebudayaan, terutama pada

kemampuan toleransi beragama melalui kerja sama *interfaith dialogue*. Indonesia memanfaatkan hal tersebut untuk turut membantu menciptakan perdamaian dunia. Terutama dalam penyelesaian damai isu Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Diplomasi *soft power* Indonesia dalam penyelesaian damai kasus Rohingya di Rakhine Myanmar baru berada pada tahap awal. Pelajaran yang diambil dari kerukunan umat beragama di Indonesia adalah adanya sinergi dan *political will* dari semua pihak untuk menjaga kerukunan dan kedamaian. Pembinaan kerukunan antar umat beragama tidak terjadi dengan seketika, melainkan melalui proses yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh pemerintah dan masyarakat. Saat ini tampaknya belum terbangun *goodwill* dari pemerintah dan rakyat Myanmar untuk menjalin kesetaraan dengan etnis Rohingya. Peran pemerintah dan pemuka agama sebagai tokoh penjaga kerukunan beragama tidak tampak sehingga tidak terbangun rasa kebersamaan yang mendukung kerukunan toleransi beragama dan kedamaian di Myanmar.

Indonesia berkomitmen untuk turut menjaga perdamaian dunia dengan peran mediasi dan pencegahan konflik melalui *soft power* diplomasi. Indonesia adalah negara rujukan bagi tumbuhnya toleransi dan harmoni di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemerintah harus mampu terus menjaga persatuan di tengah kemajemukan Indonesia karena kondisi tersebut merupakan dasar dari kekuatan *soft power* diplomasi Indonesia. Dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional dalam melaksanakan komitmen menjaga perdamaian dunia, Pemerintah Indonesia perlu memiliki agenda konflik yang menjadi fokus perhatian dan target yang diharapkan. Pemerintah Indonesia sebagai mediator perdamaian perlu memperkuat instrumen *soft power* dan tehnik pelaksanaan diplomasi. Termasuk memperluas dan memperkuat kerjasama dengan para aktor internasional lain, diantaranya pihak swasta dan LSM, sebagai pelaksanaan instrumen *soft* diplomasi di luar negeri. Karena dalam pelaksanaan *soft power* diplomasi Pemerintah tidak dapat bekerja secara efektif tanpa dukungan aktor internasional lainnya.

⁵⁵ "Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan", 31 Agustus 2017, (*online*), (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Komitmen-Bantu-Myanmar,-Menlu-Luncurkan-Program-Bantuan-Kemanusiaan.aspx>, diakses 26 Februari 2018).

⁵⁶ Diantaranya Mer-C, PMI, Walubi, dan PKPU untuk berkontribusi bagi pendirian rumah sakit/*health center* di Rakhine State. Rumah sakit dibangun untuk membantu proses rekonsiliasi dan pemulihan di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar, Dewi Fortuna. (2010). *The Impact Of Domestic And Asian Regional Changes On Indonesian Foreign Policy*, Singapore: Southeast Asian Affairs.
- Balmer, Brice H. (2006). *Meeting our Multifaith Neighbors*, Waterloo: Herald Press.
- Barston, R.P. (2014). *Modern Diplomacy*, Fourth Edition, New York: Routledge.
- Bryant, Darrol and Frank Flinn Cousins,(ed.). (1989). *In Interreligious Dialogue: Voices from a New Frontier*. New York: Paragon House.
- Call, Charles T, de Coning, Cedric (Eds.). (2017). *Rising Powers and Peacebuilding*, London; Palgrave Macmillan.
- Fan, Yin. (2008). *Soft Power: Power Of Attraction Or Confusion?*, London: Palgrave Macmillan. Graha Ilmu.
- Hamengku Buwono X. (2007). *Merajut Kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta; PT. Gramedia.
- Hayat, Bahrul. (2012). *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta: PT. Saadah Cipta Mandiri.
- Jemadu, Aleksius,(2008) *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Bandung;
- Munajat (Penyunting). (2016). *Perlindungan Terhadap Umat Beragama: Toleransi Dalam Masyarakat Majemuk*, Jakarta: Pusat Penelitian BKD DPR dan Dian Rakyat.
- Nye, Joseph S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*, 1st ed., New York: Public Affairs.
- Samovar, Larry A. dkk. (2010). *Komunikasi Lintas Budaya*, terjemahan Indri Margaretha Sidabalok, Singapura; Cengage Learning Asia.
- Trunkos, Judit. (2013). *What is Soft Power Capability and How Does it Impact Foreign Policy*, Carolina: University of South Carolina.

Jurnal

- Callahan, Mary P. (2018). MYANMAR IN 2017: Crises of Ethnic Pluralism Set Transitions Back. *Southeast Asian Affairs*, pp. 243-263.
- Fang, Yin. (2006). Branding the nation: what is being branded?, *Journal of Vacation Marketing*, Vol. 12:1.
- Hongwei, Fan. (2012). ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar, *China International Studies*.

- Mandour, Tayseir M. (2010). Islam and Religious Freedom: Role of Interfaith Dialogue in Promoting Global Peace, Brigham: *Yong University Law Review*.
- Mohamed, Abdulfatah Said; Ofteringer, Ronald. (2015). Rahmatan lil-'alamin (A mercy to all creation): Islamic voices in the debate on humanitarian principles *International Review of the Red Cross*; Cambridge Vol. 97, Iss. 897-898, (Jun 2015): pp. 371-394. DOI: 10. 1017/S1816383115000697
- Mugobo, Virimai V dan Ukpere, Wilfred I. (2011). Is Country branding a panacea or poison?., *African Journal of Business Management*, Victoria Island 5.20, hlm. 8248-8255.
- Napier, Jonathan. (2011). Interfaith Dialog Interfaith Dialogue Theory and Native/Non-Native Relations, *Illumine*, Vol 10, No 1. Centre for Studies in Religion and Society University of Victoria.
- Weber, Katja; Stanford, Allison. (2017). Myanmar: Promoting Reconciliation between the Rohingya Muslims and Buddhists of Rakhine State, *Social Justice; San Francisco* Vol. 44, Iss. 4, (2017): 55-82,167.

Internet

- Beechoct, Hannah. (2017). Across Myanmar, Denial of Ethnic Cleansing and Loathing of Rohingya, (online), ([https://www.nytimes.com/2017/10/24/world/asia/myanmar-rohingya-ethnic-cleansing.html?module=Arrows Nav&contentCollection=Asia%20Pacific&action=keypress®ion=FixedLeft&pgtype=article](https://www.nytimes.com/2017/10/24/world/asia/myanmar-rohingya-ethnic-cleansing.html?module=Arrows%20Nav&contentCollection=Asia%20Pacific&action=keypress®ion=FixedLeft&pgtype=article), diakses 12 Februari 2018).
- Dialog Lintas Agama Indonesia – Myanmar Peran Pemimpin Agama Dalam Mempromosikan Toleransi dan Harmoni, *Tabloid Diplomasi*, Mei 2017, (online), (<http://www.tabloiddiplomasi.org/index.php/2017/07/12/dialog-lintas-agama-indonesia-myanmar-peran-pemimpin-agama-dalam-mempromosikan-toleransi-dan-harmoni/> diakses 13 Februari 2018).
- Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Kedepankan Sinergi Seluruh Elemen Pemerintah dan Masyarakat, 10 Februari 2018, (online), (<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Diplomasi-Kemanusiaan-Indonesia-Kedepankan-Sinergi-Seluruh-Element-Pemerintah-dan-Masyarakat.aspx>, diakses 15 Februari 2018).

- Guest, A. (2016). *Who are the Rohingya refugees?*, (*online*), (<https://www.amnesty.org.au/who-are-the-rohingya-refugees/> diakses: 4 January 2017).
- Indonesia Mulai Bangun Rumah Sakit di Rakhine, Myanmar, (*online*), (<https://nasional.kompas.com/read/2017/11/20/15285611/indonesia-mulai-bangun-rumah-sakit-di-rakhine-myanmar/>diakses 14 Desember 2018)
- Komitmen Bantu Myanmar, Menlu Luncurkan Program Bantuan Kemanusiaan, 31 Agustus 2017, (*online*),(<https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Komitmen-Bantu-Myanmar,-Menlu-Luncurkan-Program-Bantuan-Kemanusiaan.aspx>, diakses 31 Agustus 2017)
- Menlu RI: Perdamaian Bukan Hadiah, 30 November 2017, (*online*), (<http://internasional.metrotvnews.com/VNnJlAjN-menlu-ri-perdamaian-bukan-hadiah>, diakses 27 Februari 2018).
- Pelayanan ke Semua Agama Baik, Purwakarta Diganjar Harmoni Award”, 26 Februari, 2017. *Pikiran Rakyat*, (*online*), (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawabarat/2017/02/26/pelayanan-ke-semua-agama-baik-purwakarta-diganjar-harmoni-award-394618>, diakses 26 Februari 2017)
- Pengacara Muslim Myanmar Dibunuh karena Agama?, 30 Januari 2017, (*online*), (<https://dunia.tempo.co/read/841005/pengacara-muslim-myanmar-dibunuh-karena-agama>, diakses 21 Februari 2018)
- Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Dewan Eropa, 19 November 2014, (*online*), (<http://indonesianconsulate.ae/indonesia/2014/11/20/pertemuan-antara-presiden-republik-indonesia-dengan-presiden-dewan-eropa/> diakses 15 Maret 2017).
- Rencana Strategis Tahun 2015—2019 Kementerian Luar Negeri, (*online*), (<https://www.kemlu.go.id/AKIP/Rencana%20Strategis%20Kemlu%202015-2019.pdf> diakses 14 Februari 2018).
- Soft Power* Indonesia dalam Pembangunan Asia, 17 Januari 2011, (*online*), (<https://news.detik.com/berita/1548031/soft-power-indonesia-dalam-pembangunan-asia?nd991103605=>, diakses 10 Oktober 2017).
- Tragedi Kemanusiaan atas Etnik Rohingya, (*online*, (https://article.wn.com/view/2017/09/11/Tragedi_Kemanusiaan_atas_Etnik_Rohingya/ diakses 19 September 2017)
- Majalah**
Basnur, Albusyra. (2014). *Diplomasi Mengelola Keragaman Dan Mempromosikan Toleransi, Tabloid Diplomasi*, edisi Desember.
- Koran**
Kebinekaan Jadi Modal Indonesia bagi Dunia, *Kompas*, 22 Maret 2017.
Indonesia berkontribusi dalam Perdamaian Dunia, *Media Indonesia*, 15 Februari 2018.
Isu Krusial Agama Dibahas, *Kompas* 9 Februari 2018.
- Nara sumber Wawancara**
Thamhid Masyudi, sekretaris pengurus wilayah Muhammadiyah Jatim.
Moh.Ersyad. M.HI Kasi Produk Halal, Pembinaan Syariah dan sistem Informasi Urusan Agama Islam Kanwil Agama Jawa Timur
M. Marhaban (kepala Dinas Agama Kabupaten Alor)
Yohanes B. Seja (Kasubag Informasi dan Humas Kanwil Agama NTT)
Sapto Wibowo, Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur
Baiq Wardhani (Kepala Program Studi S2 Hubungan Internasional Universitas Airlangga)
Dr. Rubaidi, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur
A.Fathoni Ketua Prodi HI dan Zaki Ismail Sekretaris Prodi HI UIN Sunan Ampel Surabaya.